

**KAJIAN TENTANG PENYERAPAN DAN DAMPAK KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN TERHADAP UKM MELALUI PROGRAM
BUSINESS PLAN PERBANKAN (2004)**

Kajian ini diselenggarakan pada tahun anggaran 2004 dengan latar belakang pemikiran adanya fenomena penyerapan dana kredit oleh UKM yang relatif rendah. Kondisi ini bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2003 yang mempublikasikan bahwa jumlah UKM mencapai 99,90% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja 99,4% dari total angkatan kerja yang tersedia. UKM diyakini memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian nasional, namun perhatian khusus kepada komunitas ini masih tergolong terbatas. Setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, berbagai kalangan masyarakat seakan-akan memperoleh kesadaran kolektif untuk memperkuat dan memposisikan UKM sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional. Secara umum, ketahanan UKM dalam berbagai kondisi perekonomian mendesak berbagai *stakeholders* untuk mengembangkan potensi UKM agar berkontribusi lebih optimal di waktu mendatang. Dalam kerangka ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UKM memerlukan solusi pemecahan dan salah satu di antaranya mengatasi akses UKM di bidang permodalan.

Berkaitan dengan kondisi ini, Bank Indonesia sejak tahun 2002 telah menganjurkan seluruh sektor perbankan untuk menyusun *business plan* yang materinya memuat rencana penyaluran kredit kepada UKM. Menurut data tahun 2003, tercatat sebesar Rp 26,9 triliun telah disalurkan oleh sektor perbankan ke UKM dan jumlah ini adalah sekitar 63,82 persen dari total portofolio yang tersedia untuk kredit UKM. Total portofolio bagi UKM yang tersedia tahun 2003 sekitar Rp 42 triliun dan data tersebut menginformasikan jumlah dana yang belum terserap sekitar Rp 15,4 triliun. Sektor UKM memang layak diberi dukungan permodalan, sebab menurut laporan Bank Indonesia tahun 2003, kinerja UKM cukup baik dan tercermin dari rendahnya nilai *Non Performing Loan* (NPL) UKM

dibandingkan dengan sektor-sektor usaha lainnya. Nilai NPL yang rendah berarti risiko kredit UKM yang bermasalah relatif lebih rendah daripada sektor usaha lainnya. Meskipun demikian, dari berbagai hasil kajian juga ditemukan bahwa permintaan dana oleh UKM sebenarnya masih cukup tinggi. UKM pada umumnya tidak mempersoalkan tingginya beban bunga pinjaman sepanjang prosedur dan persyaratan kredit dapat atau mudah dipenuhi oleh UKM.

Di pihak lain, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor perbankan ditengarai karena adanya fenomena *credit crunch*, yaitu kondisi di mana terjadi penurunan suplai kredit yang disebabkan oleh rendahnya kemauan bank untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha, termasuk ke komunitas UKM..

Kajian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji efektivitas penyerapan kredit perbankan oleh UKM; 2) mengkaji dampak kebijakan pembiayaan bagi perkembangan UKM. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan model *Focus Group Discussion* (FGD), kuesioner, *in depth interview*, dan kajian pustaka. Adapun variabel penelitian terdiri dari :

- 1) pengaruh *business plan* perbankan;
- 2) pengaruh akses permodalan UKM;
- 3) pengaruh persyaratan dan prosedur kredit bagi UKM;
- 4) dampak pembiayaan terhadap kinerja UKM;
- 5) lembaga pendukung, dinas koperasi, Kadin, dan BDS.

Untuk mengamati kinerja perbankan ditinjau dari jumlah dan portofolio yang diterima dan belum disalurkan ke UKM digunakan analisis risiko relatif (*relative risk analysis*). Adapun responden penelitian meliputi tiga kelompok besar, yaitu sektor perbankan (13 bank), sektor UKM dan lembaga pendukung. Lokasi penelitian mencakup 10 provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa FGD diselenggarakan di empat provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Garis besar dari hasil FGD di empat provinsi tersebut terangkum ke dalam dua kelompok masalah, yaitu dari sudut pandang perbankan dan dari sudut pandang UKM, sebagai berikut :

Dari sisi perbankan, di antaranya adalah : 1) *collateral* UKM yang tidak memadai; 2) UKM tidak *bankable* karena manajemen kurang baik; 3) rendahnya *repayment capacity* (tingkat pengembalian) UKM; 4) kurangnya informasi mengenai UKM potensial; 5) kelayakan usaha UKM relatif rendah. Sedangkan dari sisi UKM, antara lain: 1) agunan yang tersedia tidak memenuhi syarat; 2) tidak memiliki catatan mengenai aliran uang (*cash flow*); 3) pihak bank enggan menanggung risiko kredit ; 4) tingginya bunga kredit; 5) kurangnya informasi mengenai kredit yang tersedia; 6) kredit tidak tersedia tepat waktu; 7) dasar pengucuran kredit lebih pada pertimbangan aspek karakter dan *feeling* perbankan (kasus di Jawa Timur). *In depth interview* di provinsi Bali dilakukan pada nasabah PT Bank Bukopin dan nasabahnya yang menerima kucuran kredit bank tersebut.

Apabila dicermati dari aspek perencanaan dengan realisasi kredit sesuai *business plan* pihak perbankan, ditemukan beberapa kondisi yang memprihatinkan karena umumnya realisasi lebih rendah dari rencana. Pihak perbankan berargumentasi bahwa kondisi ini diakibatkan oleh tidak adanya keselarasan antara persyaratan kredit dengan kemampuan UKM. Meskipun demikian, penelitian ini menyajikan data makro *business plan* perbankan selama tiga tahun (tahun 2002, 2003, dan 2004) tentang rencana dan realisasi kredit modal kerja bagi UKM di sektor pertanian, pertambangan, industri, kelistrikan, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, jasa dunia usaha, jasa sosial, dan sektor-sektor lain. Secara rata-rata tercatat adanya peningkatan signifikan, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi kredit, khususnya untuk modal kerja bagi UKM.

Dalam kajian literatur, disajikan mengenai garis besar kebijakan perbankan, yaitu yang berkaitan dengan program penyehatan perbankan, pemantapan ketahanan sistem perbankan, dan upaya pengembangan UKM, yang seluruhnya diarahkan untuk pemulihan fungsi intermediasi sektor perbankan. Sedangkan untuk pengembangan UKM, Bank Indonesia menetapkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan melalui kredit perbankan, pengembangan kelembagaan, dan pemberian bantuan teknis. Di samping itu, disajikan juga tentang definisi dan prosedur kredit, jenis kredit, dan definisi *business plan*. Khusus mengenai *business plan*, disebutkan sebagai perencanaan perusahaan yang bermanfaat untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki, fokus kepada hal-hal penting dan persiapan menghadapi potensi permasalahan, dan peluang keuntungan di masa depan.

Kesimpulan hasil kajian, antara lain: 1) faktor tingkat bunga yang tinggi bersifat relatif karena di sebagian daerah tingginya persentase bunga tidak dipermasalahkan oleh UKM sepanjang *return* yang diterima cukup memadai. Dalam kajian ini secara khusus ditemukan adanya keluhan tingginya tingkat bunga di provinsi Jawa Tengah; 2) dalam *business plan* perbankan, terutama di daerah kajian ditemukan bahwa realisasi penyaluran kredit modal kerja bagi UKM selama tiga tahun, dari tahun 2002, 2003 dan tahun 2004 rata-rata melampaui target; 3) fungsi konsultasi dan bantuan manajemen belum banyak disentuh oleh pihak perbankan karena sebagian bank menganggap bukan *core competency* bisnis perbankan, meskipun kepentingan pihak perbankan dapat dikelola apabila fungsi ini dilaksanakan meskipun oleh pihak ketiga. Sementara itu, dalam program penyehatan perbankan, pemantapan ketahanan sistem perbankan, dan upaya pengembangan UKM fungsi tersebut secara eksplisit sudah tercantum.